

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Setujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2024



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/428159/dprd-kalsel-setujui-apbd-p-2024>

DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Raperda RAPBD-P) 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HS dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar hadir mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada Rapar Persetujuan APBD-P Kalsel 2024 di Banjarmasin, Senin.

DPRD Provinsi Kalsel menyetujui postur APBD-P Kalsel 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah mencapai Rp11,470 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp13,175 triliun atau mengalami selisih sekitar Rp1,704 triliun.

Sementara itu, sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan Sekda Provinsi Kalsel, menyatakan akan memperhatikan segala masukan serta saran dari DPRD.

Sahbirin atau Paman Birin berharap agenda kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah bisa terselesaikan dengan baik.

"Semua pembangunan yang kita laksanakan sudah tentu bermuara untuk kesejahteraan masyarakat," tutur Paman Birin.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel melaporkan hasil pembahasan RAPBD-P 2024 menerima menjadi APBD-P 2024.

Namun, Banggar DPRD Kalsel memberikan rekomendasi, antara lain agar Pemprov Kalsel lebih banyak menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Sebab kalau melihat pendapatan daerah pada RAPBD-P 2024 masih banyak dana transfer dari pemerintah pusat. Ke depan harus kita kurangi ketergantungan dengan pusat," ungkap anggota Banggar DPRD Kalsel H Suwardi Sarlan.

Banggar DPRD Kalsel juga mengapresiasi rencana pemanfaatan APBD-P 2024 untuk melanjutkan pembangunan yang fokus antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta hilirisasi industri.

Rapat Paripurna DPRD Kalsel membahas Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/428159/dprd-kalsel-setujui-apbd-p-2024>, 2 September 2024.
2. <https://diskominfo.kalselprov.go.id/2024/09/02/pemprov-bersama-dprd-kalsel-setujui-tiga-raperda-demi-kesejahteraan-masyarakat/>, 2 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD

